

## Jokowi Sebut 22 Stadion Sepak Bola Telah Diaudit oleh Kementerian PUPR

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ungkap bahwa 22 stadion sepak bola yang tersebut di seluruh Indonesia telah diaudit dan dievaluasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Hal tersebut disampaikan Kepala Negara dalam keterangannya saat meninjau Kawasan IB, Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Jumat (24/2) yang dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

“Sesuai dengan perintah saya kepada Menteri PU untuk mengaudit stadion sepak bola kita, ada 22 stadion,” ujar Jokowi.

Sebanyak 22 stadion tersebut merupakan stadion yang memiliki risiko tinggi untuk penyelenggaraan Liga Satu, Liga Dua, dan Piala Dunia U-20 pada tahun

2023.

“22 stadion dengan kapasitas kurang lebih 20 ribu penonton dengan risiko tinggi selama Liga Satu dan Liga Dua dan juga untuk Piala Dunia U-20 tahun 2023,” kata Jokowi.

Berdasarkan hasil audit dan evaluasi tersebut, diketahui lima stadion yang dinilai rusak berat. Empat di antaranya perlu direhabilitasi, sedangkan satu stadion lainnya perlu dibongkar.

“Kemudian 13 stadion rusak sedang perlu direnovasi, dan empat stadion rusak ringan perlu direnovasi ringan,” kata Jokowi.

Sementara itu, untuk Stadion Kanjuruhan, Presiden mengatakan bahwa saat ini masih sedang dalam tahap perencanaan ulang. “Ini baru dalam proses redesign untuk rehabilitasi totalnya,” ujar Jokowi menambahkan. ● mei

## Mahfud M Komentari Amien Rais dkk yang Gaungkan soal Politik Identitas

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengomentari pernyataan Partai Ummat yang secara terang-terangan ingin mengusung politik identitas serta menggunakan masjid sebagai sarana berpolitik.

Mahfud mengingatkan Amien Rais dkk bahwa “politik” dalam diskursus ini multitafsir. Ia tak menampik bahwa politik identitas dan masjid sebagai sarana berpolitik bisa saja dianggap tak membahayakan, selama ditafsirkan sebagai high politics/politik inspiratif, bukan politik elektoral.

“Seperti yang dikatakan Pak Amien Rais akan mengancam politik identitas, (berpolitik) melalui masjid-masjid, itu tidak apa-apa, (selama) menyatakan umat Islam agar menjaga NKRI ini bersama-sama, sebagai bagian dari politik inspiratif,” ungkap Mahfud di daerah Slipi, Jakarta, Jumat (24/2).

“Partai Ummat akan

memperjuangkan politik identitas dan mempergunakan masjid-masjid sebagai tempat perjuangan. Itu apa artinya?” imbuhnya.

Namun, apabila yang dimaksudkan oleh Partai Ummat adalah politik identitas dan pemakaian masjid sebagai sarana berpolitik elektoral, sebaiknya mereka menjauhi keinginan tersebut.

“Kalau diartikan lain, ya tidak usah dikampanyekan di masjid. Itu bagi kita paling tidak yang tergabung dalam golongan ahlu-sunnah wal jamaah,” ungkap Mahfud.

Mahfud memberi contoh, politik inspiratif atau high politics tersebut berkaitan dengan pernyataan-pernyataan semisal “negara harus dipimpin orang yang adil”, “korupsi harus dilawan”, “keadilan harus ditegakkan”, dan “lingkungan hidup harus dipelihara demi kebaikan manusia”.

“Itu politik, bahasa-bahasa politik. Politik dalam arti urusan negara,” ungkap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut. ● han

## Menhan Prabowo Boyong Industri Pertahanan Lokal IDEX UEA

ABU DHABI (IM) - Delegasi Indonesia yang dipimpin Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto berpartisipasi dalam *The 16th Edition of the International Defence Exhibition and Conference (IDEX) 2023* di Abu Dhabi UEA, yang berlangsung dari tanggal 20 sampai dengan 24 Februari 2023.

Prabowo pun memboyong Industri Pertahanan dalam negeri produk BUMN dan swasta meliputi, PT LEN, PT Dahana, PTIDI, PT PAL, PT Pindad, dan BUMS terdiri dari PT Batanghari Sukses Makmur.

Lalu PT Teknik Tadakra Sumberkarya, dan penyelenggara Indo Defence 2024 Expo & Forum PT Napindo Media Ashatama. Prabowo berharap bahwa ajang IDEX 2023 bisa memperkenalkan industri pertahanan Indonesia ke kancan dunia.

“Ini salah satu ajang industri pertahanan kita bisa dikenal oleh pasar dunia. Kita harus mandiri dan terus bertumbuh,” kata Prabowo, Jumat (24/2).

Dirut PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Marsda TNI Gita Amperawan mengatakan keikutsertaan PTDI dalam IDEX 2023 merupakan salah satu upaya untuk memperkuat kerja sama dengan beberapa strategic partner, penetrasi kontrak/pekerjaan baru, serta mempertahankan eksistensi di pasar global.

“IDEX 2023 merupakan ajang yang luar biasa bagi industri pertahanan, produk dan kapabilitas PTDI dalam bidang aerospace yang diharapkan mendapat perhatian khusus dari negara-negara di dunia, termasuk jasa perawatan pesawat terbang oleh PTDI, terutama di wilayah Asia,

Afrika dan Timur Tengah yang saat ini menjadi pasar prioritas kami,” jelasnya.

Pada kesempatan kali ini, sejumlah produk unggulan PTDI seperti CN235-220 MPA dan N219 Amphibi turut ditampilkan.

Sementara itu, Chief Marketing Officer (CMO) PT PAL Indonesia Willgo Zainar yang turut serta dalam IDEX 2023 menegaskan dengan berpartisipasi dalam IDEX 2023, PT PAL Indonesia melanjutkan hubungan tata kelola (G to G) dan bisnis (B to B) antara Indonesia dan UEA.

Langkah strategis ini sebagai strategi jangka panjang perusahaan untuk memperluas bisnisnya secara global, terutama di Timur Tengah untuk mempromosikan dan mengusulkan beberapa state of art PT PAL seperti Landing Platform Docks (LPD), Kapal Rumah Sakit (atau dikenal sebagai BRS), dan Fast Attack Craft Missile (FACM) 60M.

“PT PAL kini fokus pada pasar global sebagaimana yang menjadi target Presiden Joko Widodo dan Menhan Prabowo Subianto di masa DEFEND ID diharapkan bisa menjadi Top 50 Global Defense Industry di masa mendatang, sangat penting bagi PT PAL tidak hanya hadir di ajang kelas dunia ini, tetapi juga memperkuat posisi PAL sebagai pemain global,” ujarnya.

Sementara dari industri pertahanan swasta, PT Batanghari Sukses Makmur yang menjadi salah satu peserta IDEX 2023 mengungkapkan rasa syukurnya atas inisiasi dan fasilitas yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan RI untuk mengikuti pameran pertahanan internasional di Abu Dhabi ini. ● mei

# 2 Polhukam

FOTO: ANTARA



## SRI MULYANI COPOT JABATAN RAFAEL ALUN TRISAMBODO

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kanan) didampingi Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi (kiri) dan Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo (tengah) menggelar konferensi pers penanganan internal Kementerian Keuangan atas kasus Rafael Alun Trisambodo di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (24/2). Dalam konferensi pers tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencopot jabatan struktural dan tugas-tugas Rafael Alun Trisambodo sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Rafael dicopot dari jabatannya terkait buntut kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya, Mario Dandy Satriyo.

## TERKAIT KASUS PENGANIAYAAN

# Wapres Ma'ruf Amin Dukung Menkeu Copot Rafael Alun dari Jabatannya

Sri Mulyani mencopot Rafael Alun Trisambodo (RAT) dari jabatannya menyusul kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya kepada David.

MAMUJU (IM) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mendukung langkah tegas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang mencopot jabatan Rafael Alun Trisambodo sebagai Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Jakarta Selatan.

Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pejabat yang pamer harta harus diingatkan. “Saya kira tindakan Bu Menteri itu sudah benar, ya kalau ada pejabat yang memamerkan hidup hedonis itu perlu diingatkan ya,” ujarnya di Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat (24/2).

Tindakan pencopotan pejabat tersebut diharapkan bisa mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat.

“Jangan sampai ada ketidakpercayaan masyarakat terutama mereka yang membayar pajak kemudian mereka wah, mereka menjadi ada ketidakpercayaan pajak saya digunakan untuk orang per orang. Saya kira itu penting,” ujarnya.

“Dan saya kira pajak yang sudah dibayarkan oleh masyarakat, itu memang dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat, apa itu sekolah, jalan, infrastruktur, bansos, dan semua untuk kepent-

ingan masyarakat. Dan ini kepercayaan masyarakat itu penting,” imbuh Wapres.

Wapres menegaskan bahwa jika ada tindakan pejabat yang melanggar, maka tepat dilakukan pencopotan seperti yang dilakukan oleh Menkeu Sri Mulyani saat ini.

“Karena itu kalau ada (pejabat hedon) tindakan bu Menteri tepat sekali,” tegas Wapres.

Diketahui, pencopotan ini buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh anak Rafael Alun, Mario Dandy Satriyo (MDS), yang kini sudah ditetapkan tersangka.

Dia diketahui menjadi tersangka pengeroyokan anak pengurus GP Ansor, David.

Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo merupakan ayah dari tersangka juga pernah menjabat Direktur Cabang Intelijen dan Penyidikan

Kanwil DJP I Jawa Tengah. Selain itu, Rafael pernah juga menjabat sebagai Kepala Penelitian Penagihan Pajak dan Penagihan Pajak Kanwil DJP Jawa Timur I.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani resmi mencopot Rafael Alun Trisambodo (RAT) dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Hal itu menyusul kasus anak Rafael yang bernama Mario Dandy Satriyo karena telah melakukan penganiayaan.

“Mengenai status dari saudara RAT yang bersangkutan per kemarin kita copot dari jabatannya, tetap ASN, yang berarti tetap terikat dengan seluruh kode etik, seluruh disiplin, seluruh aturan administratif ASN,” ujar Suahasil di Kantor Pusat DJP Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan, Jumat (24/2).

Dia juga mengatakan kalau pencopotan ini untuk upaya mempermudah pemeriksaan.

“Pencopotan tersebut dilakukan karena pemeriksaan akan kita lakukan dan ini adalah untuk mempermudah upaya pemeriksaan,” jelasnya.

Namun, meski posisinya dicabut, RAT masih memegang status sebagai PNS/Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Status RAT masih tetap ASN. Ini berarti yang bersangkutan tetap terikat dengan seluruh kode etik disiplin dan aturan administrasi ASN, pencopotan hanya dilakukan karena pemeriksaan akan dilakukan, ini untuk mempermudah pemeriksaan,” ungkapnya.

Diketahui, anak Rafael telah melakukan penganiayaan kepada putra pejabat GP Ansor hingga tak sadarkan diri. ● han

## KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Eks Wakil Ketua MA Andi Samsam

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan bahwa mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Andi Samsam Nganro absen alias tidak memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik pada Kamis, 23 Februari 2023. KPK bakal menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap mantan Juru Bicara (Jubir) MA tersebut.

“Andi Samsam Nganro, saksi tidak hadir dan kembali kami dapatkan informasi, saksi tersebut belum memberikan konfirmasi mengenai alasan ketidakhadirannya. Penjadwalan dan pemanggilan ulang segera disiapkan tim penyidik,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (24/2).

Sedianya, Andi Samsam

Nganro dipanggil penyidik untuk diminta keterangannya sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. MNC Portal Indonesia sudah mencoba menghubungi Andi Samsam ihwal pemanggilan KPK tersebut, namun belum direspons. Belum diketahui apa yang ingin didalami penyidik dari keterangan Andi.

Selain Andi Samsam, dua saksi kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara di MA lainnya juga tidak hadir pada Kamis kemarin. Keduanya yakni, Pemeriksa Pertama Auditorat Utama Keuangan Negara V, Diana Siregar dan pihak swasta, Ihsan Ibrahim Elmad. KPK juga akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap keduanya.

“Kedua saksi tidak hadir dan masih dilakukan pen-

jadwalan kembali,” terang Ali.

Sekadar informasi, KPK saat ini sedang mengembangkan kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara di MA. KPK menduga banyak pihak yang terlibat dalam kasus ini. KPK sedang mendalami keterlibatan pihak lain tersebut lewat pemeriksaan saksi. Diduga, tak sedikit pihak yang memberi maupun menerima suap terkait pengurusan perkara di MA.

Dalam pengembangan perkara tersebut, KPK melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemendikbud telah mencegah dua orang untuk bepergian ke luar negeri. Keduanya adalah penyanyi Windy Yunita Ghemary dan Komisaris PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto. ● han

## Gilran Politikus PDIP Anak Mantan Bupati Banjarnegara Diperiksa KPK

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Anggota DPRD Banjarnegara Fraksi PDI-Perjuangan, Amalia Desiana, Jumat (24/2).

Amalia adalah anak kandung mantan Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono (BS), yang kini terjerat kasus di KPK.

Amalia Desiana diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Budhi Sarwono. Keterangan mantan Direktur PT Sutikno Tirta Kencana tersebut dibutuhkan untuk sekaligus melengkapi berkas penyidikan pencucian uang Budhi Sarwono.

“Pemeriksaan dilakukan di Mako Brimob Kompi 2 Batalyon D Purwokerto, Jalan Letjen Suharto, Karangambu, Purwanegara, Purwokerto, Jawa Tengah, atas nama Amalia Desiana,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (24/2).

Amalia Desiana sudah pernah dipanggil penyidik KPK beberapa waktu lalu sebagai saksi terkait kasus pencucian uang yang menjerat ayahnya. Diduga, penyidik masih membutuhkan keterangan Amalia untuk mengonfirmasi aliran dana serta sejumlah aset milik Budhi Sarwono.

Sekadar informasi, KPK kembali menetapkan mantan Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono (BS) sebagai tersangka. Kali ini, Budhi Sarwono ditetapkan sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Budhi ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup.

Budhi Sarwono diduga telah menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil dugaan korupsi terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Banjarnegara ke sejumlah aset. Budhi diduga sengaja menyamarkan uang hasil korupsi ke sejumlah aset agar tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum.

Sebelumnya, KPK telah lebih dulu menetapkan Budhi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara Tahun 2017-2018, dan sejumlah penerimaan gratifikasi. Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan orang kepercayaan, Kedy Afandi (KA).

Dalam perkara korupsi, Budhi diduga memerintahkan Kedy untuk mengatur proyek pekerjaan infrastruktur di Banjarnegara. Budhi juga diduga mengarahkan Kedy untuk menetapkan adanya komitmen *fee* terhadap para pengusaha yang ingin menggarap proyek infrastruktur di Banjarnegara.

Tak hanya itu, Budhi juga diduga berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan masih membutuhkan keterangan Amalia untuk mengonfirmasi aliran dana serta sejumlah aset milik Budhi Sarwono.

Salah satu perusahaan milik keluarga Budhi yang ikut dalam proyek infrastruktur di Banjarnegara yakni PT Bumi Redjo. Budhi diduga telah menerima komitmen *fee* atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara, sekitar sejumlah Rp2,1 miliar. ● han



## OPERASI TEKNOLOGI MODIFIKASI CUACA

Prajurit TNI Angkatan Udara mempersiapkan garam untuk Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di Lanud Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (24/2). Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama TNI AU melaksanakan Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dengan menabur 10 ton garam di wilayah Jawa Tengah guna mengantisipasi potensi hujan ekstrem.